



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

SEJARAH INDONESIA



KELAS
XII



**PERAN PELAJAR, MAHASISWA, DAN PEMUDA DALAM
PERUBAHAN POLITIK DAN KETATANEGARAAN
SEJARAH INDONESIA KELAS XII**

PENYUSUN

**Asep Zainuddin M.Pd
SMA Negeri 106 Jakarta**

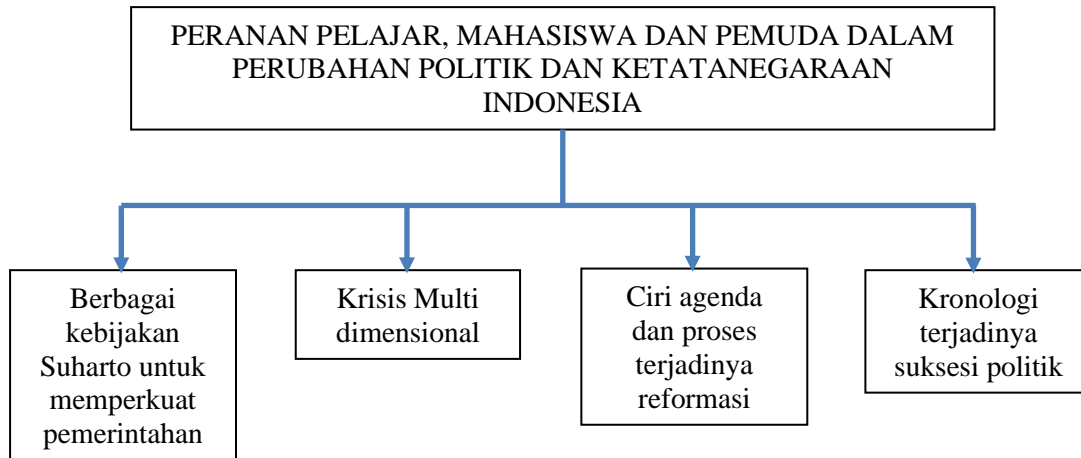
DAFTAR ISI

PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
GLOSARIUM	iv
PETA KONSEP	v
PENDAHULUAN	1
A. Identitas Modul	1
B. Kompetensi Dasar	1
C. Deskripsi Singkat Materi	1
D. Petunjuk Penggunaan Modul	1
E. Materi Pembelajaran	2
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	3
BERBAGAI KEBIJAKAN SUHARTO UNTUK MEMPERKUAT PEMERINTAHAN DAN KRISIS MULTIDIMENSIONAL	3
A. Tujuan Pembelajaran	3
B. Uraian Materi	3
C. Rangkuman	9
D. Penugasan Mandiri	9
E. Latihan Soal	10
F. Penilaian Diri	12
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	13
Ciri, Agenda dan proses terjadinya Reformasi dan Kronologi terjadinya suksesi politik	13
A. Tujuan Pembelajaran	13
B. Uraian Materi	13
C. Rangkuman	19
D. Penugasan Mandiri	19
E. Latihan Soal	20
F. Penilaian Diri	21
EVALUASI	21
DAFTAR PUSTAKA	30

GLOSARIUM

Akumulasi	: Pengumpulan, Penimbunan, Penghimpunan
Hak Asasi Manusia	: Hak – hak dasar yang dimiliki manusia menyangkut hak hidup. Hak berpolitik, hak memeluk agama dan kepercayaan dan hak memperoleh penghidupan yang layak
Hak interplasi	: Hak DPR untuk mengajukan undang – undang mengenai masalah tertentu kepada pemerintah
Hak angket	: hak DPR untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban kepada pemerintah
Inflasi	: Kemerosotan nilai uang karena banyaknya uang yang beredar yang menyebabkan naiknya harga barang
Konglomerat	: Pengusaha besar yang mempunyai perusahaan atau anak perusahaan
Legitimasi	: Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah benar – benar orang yang dimaksud
Makro ekonomi	: Bagian dari teori ekonomi yang mendalami hubungan diantara kumpulan besar ekonomi, seperti pembelajaran, penanaman modal, pendapatn nasional dan ekspor impor
Massa Mengambang Moneter	: Kebijakan sistem kepartaian tertutup dan depolitisasi massa : berhubungan dengan uang atau keuangan negara
Monopolistik	: Suatu bentuk penguasaan secara menyeluruh
Pasca	: Kalimat bentuk terikat yang berarti sesudah
Reformasi	: Gerakan politik untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang telah menyeleweng dari amanat Pancasila dan UUD 45
Transisi	: Peralihan dari satu keadaan, tindakan, kondisi, atau tempat yang lain

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: Sejarah Indonesia
Kelas	: XII IPA/ IPS
Alokasi Waktu	: 4 x 45 Menit
Judul Modul	: Peran Pelajar , Mahasiswa , dan Tokoh Masyarakat Pada Masa Awal Reformasi

B. Kompetensi Dasar

- 3.7 Mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia
- 4.7 Menulis sejarah tentang peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia

C. Deskripsi Singkat Materi

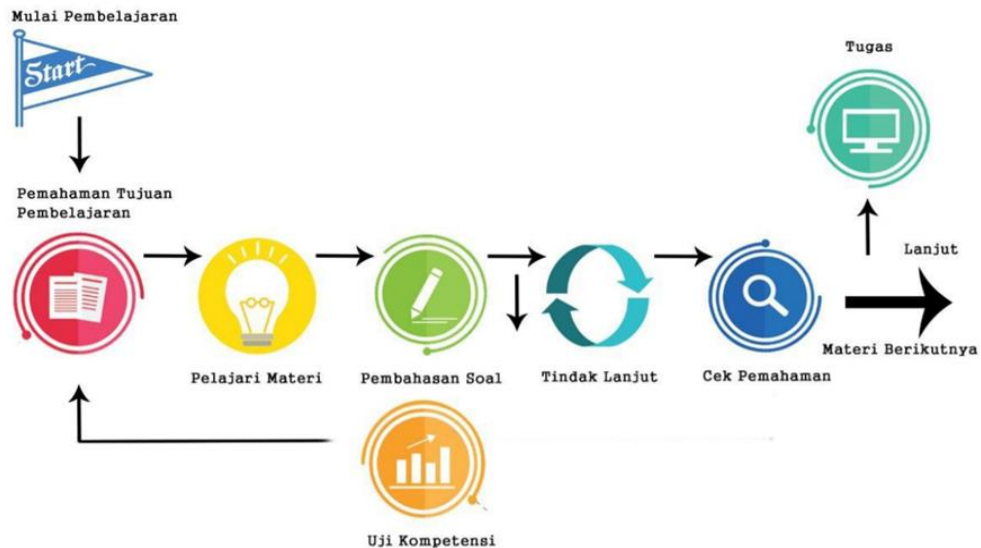
Kalian akan mempelajari beberapa materi : Penguatan Pemerintahan pada masa Orde Baru, Krisis Multi Dimensional , Ciri, Agenda dan proses Reformasi, Kronologi terjadinya suksesi politik

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Agar dapat mempelajari modul ini dengan efektif kalian harus memahami terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai sehingga dalam memahami setiap materi kalian mampu berpikir sistematis sesuai dengan arah tujuan yang ditetapkan.

Panduan Belajar

1. Pahami setiap materi, teori dasar yang akan menunjang penguasaan suatu pekerjaan dengan membaca secara teliti. Apabila terdapat tugas baik tugas individu maupun kelompok, maka kerjakan tugas-tugas tersebut sebagai sarana latihan. Bilamana perlu konsultasikan hasil tersebut kepada guru pamong atau guru bina
2. Jawablah setiap penilaian pembelajaran dengan jawaban yang benar serta kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian setelah mempelajari modul ini.
3. Catatlah kesulitan yang kalian dapatkan dalam modul ini untuk ditanyakan pada guru pada saat kegiatan tatap muka. Bacalah referensi yang lain yang berhubungan dengan materi modul agar kalian mendapatkan pengetahuan tambahan.
4. Alur kegiatan dari modul ini



E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **2** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : 1. Membahas tentang Penguatan Pemerintahan pada masa Orde Baru, Terjadinya krisis Multi Dimensional pada akhir pemerintahan Orde Baru

Kedua : 1. Membahas tentang Ciri, Agenda dan proses terjadinya Reformasi
2. Membahas tentang Kronologi terjadinya suksesi politik

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

BERBAGAI KEBIJAKAN SUHARTO UNTUK MEMPERKUAT PEMERINTAHAN DAN KRISIS MULTIDIMENSIONAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan, kalian mampu memahami tentang bagaimana penguatan pemerintah pada masa orde baru sebagai dampak dari berbagai kebijakan yang ada pada saat itu, dan bagaimana proses terjadinya krisis multidimensional yang terjadi pada saat itu

B. Uraian Materi



Tentunya anak – anak sudah tahu gambar diatas ini, yah beliau adalah Presiden Suharto, beliau menjabat Presiden di Indonesia selama 32 Tahun , masa pemerintahan beliau disebut dengan masa Orde Baru, berikut ini kita akan membahas berbagai kebijakan beliau menjelang akhir pemerintahannya

- I. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto untuk memperkuat kedudukan negara , seperti :

1. Dwi Fungsi ABRI

Melalui keputusan sidang umum MPR, ditetapkan secara resmi Dwi Fungsi ABRI sebagai peran ABRI dalam pembangunan bangsa. Dwi Fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer di izinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Konsep Dwi Fungsi TNI pertama kali muncul pada tahun 1958 yang memberikan peluang bagi peranan terbatas TNI didalam pemerintahan sipil.

Pada masa pemerintahan Soeharto, konsep ini mengalami perubahan dan menjadikan TNI secara organisatoris (bukan perseorangan) menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati, serta lembaga-lembaga legislatif dalam wadah Fraksi ABRI/TNI. Melalui konsep Dwi Fungsi, ABRI merupakan kekuatan signifikan dalam percaturan politik Indonesia. Dengan memakai konsep Dwi Fungsi, kekuatan sosial politik ABRI merambah berbagai sektor kehidupan masyarakat. Misalnya, di bidang birokrasi, dominasi militer terlibat dari pengisian jabatan-jabatan di pemerintahan yang diisi oleh perwira militer atau penunjukan perwira militer aktif menjadi anggota MPR. Dengan memanfaatkan Dwi Fungsi ABRI ini, Orde Baru telah berhasil melegitimasi kekuasaan.



Dampak negatif Dwi Fungsi adalah penerapan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah pembangunan. Kebijakan tersebut menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di kalangan rakyat yang bersengketa dengan pemerintah. Misalnya, terjadinya kasus Kedungombo di Jawa Tengah, kasus Way Jepara di Lampung, penembakan oleh aparat di Waduk Nipah, Madura, dan kasus 27 Juli 1996.

2. Konsep Massa Mengambang

Didalam bidang politik dalam negeri, beberapa langkah penting juga di ambil oleh Pemerintah Orde Baru, seperti memberlakukan konsep massa mengambang (floating mass) sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik (parpol) dan organisasi massa (ormas) yang ada di Indonesia.



Dalam konsep massa mengambang, rakyat secara luas di pisahkan dari kehidupan politik. Partai-partai politik dibatasi ruang gerak dan aktifitasnya karena partai dilarang mendirikan perwakilan di tingkat desa sehingga ikatan antara partai dan massa sangat terbatas. Hubungan antara partai politik dan massa rakyat hanya berlangsung pada Pemilu. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk Golkar yang dikategorikan sebagai nonpartai. Melalui aparat desa yang menjadi kadernya, Golkar aktif melakukan penggalangan massa.

3. Korporatisasi Negara

Stabilitas menjadi unsur penting dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas dengan berusaha mengendalikan lawan-lawan politiknya. Aparatur negara harus benar-benar setia dan patuh pada pemerintahan yang berkuasa yang dikamouflasikan sebagai penjelmaan dan atas nama rakyat. Untuk itu, lahir organisasi Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) untuk wadah para pegawai pemerintah.

Pemerintah juga membentuk berbagai organisasi untuk berbagai profesi, kelompok masyarakat, dan mahasiswa. Muncul organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk buruh, PGRI (Persatuan Guru Indonesia) untuk guru, KNPI (Komite Nasional Pemuda

Indonesia) untuk para pemuda, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk para wartawan, dan masih banyak lagi.



Semua organisasi sosial kemasyarakatan itu, sayangnya arah pembentukannya hanya ditunjukkan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Caranya pada setiap pelaksanaan pemilu mereka diarahkan dan diwajibkan untuk memilih Golkar dan tidak diberi kebebasan untuk memilih.

4. Sentralisasi Pemerintahan

Melalui UU No 5/1974 dan UU No. 5/1979 disusun struktur pemerintahan daerah dan desa yang memperkuat kedudukan pemerintah. Pemerintah Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari pusat. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintahan daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat. Misalnya, dalam bidang ekonomi, semua kekayaan daerah dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah dikuasai oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah.

5. Program Bantuan Luar Negeri

Pada tahun 1967 kelompok negara-negara Barat, AS, dan Jepang membentuk Lembaga internasional pemberi pinjaman luar negeri untuk Indonesia atau *Inter-Governmental Group for Indonesia* (IGGI). Melalui Lembaga IGGI tersebut pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri, di samping mengadakan penanguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran Kembali (*rescheduling*) utang-utang peninggalan Orde Lama. Bantuan kredit yang didapat adalah untuk tahun 1967 sebesar 210 juta dolar AS, untuk tahun 1968 sebesar 325 juta dolar AS, dan untuk tahun 1969 sebesar 500 juta dolar AS. Di samping itu, pemerintah juga menjadi anggota badan-badan ekonomi internasional seperti *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) atau *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), *International Development Agency* (IDA), dan *Asian Development Bank* (ADB).

Dari Lembaga-lembaga internasional ini Indonesia mendapat bantuan kredit, tenaga ahli, dan rekomendasi untuk menghadapi negara-negara kreditor. Pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk membiayai anggaran belanja pembangunan karena menurut pemerintah, pembangunan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri. Menurut P. Simanjuntak, sampai bulan Februari 1998, utang luar negeri pemerintah Indonesia telah mencapai 73 miliar dolar AS.

6. Sistem Semi Perwakilan

Dalam bidang politik, penerapan system kepartaian yang mengacu pada UU No.3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde

Baru. Namun, system tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. Menurut Marbun, ketiga parpol yaitu PDI, PPP, dan Golkar kurang berhasil dalam menjalankan fungsi mereka sebagai control terhadap kebijakan pemerintah karena tidak memiliki kemandirian. Ketidakmandirian ini tampak pada ketergantungan ketiga orsospol kepada subsidi dana dan rekomendasi dari pemerintah.

Di samping itu, PPP dan PDI juga menghadapi masalah adanya perlakuan istimewa pemerintah terhadap Golkar. Keterbatasan system kepartaian ini mengakibatkan berbagai kelemahan dalam sistem demokrasi perwakilan. Hal ini tercermin dengan munculnya berbagai kasus unjuk rasa petani, buruh, dan masyarakat lainnya yang tidak perlu terjadi seandainya lembaga perwakilan pemerintah telah berfungsi secara baik. Ketidakberhasilan ini juga terlihat dari fakta bahwa sejak DPR hasil Pemilu 1971 tidak satupun rancangan undang-undang (RUU) yang dihasilkan atas usul inisiatif DPR.

masyarakat juga belum menyaksikan bagaimana hak-hak dewan yang lain, seperti hak interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (penyelidikan) dimanfaatkan secara optimal oleh para anggota dewan tersebut.

Dampak Menguatnya Peran Negara pada masa Pemerintahan Orde Baru

1. Dampak dalam Bidang Politik

- a. Adanya Pemerintahan yang Otoriter
- b. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.
- c. Dominasi Golkar
Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan.
- d. Pemerintahan yang Sentralistis
Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri.

2. Dampak dalam Bidang Ekonomi

- a. Munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- b. Adanya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial
Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat.
- c. Konglomerasi
Pola dan kebijakan perekonomian yang ditempuh pemerintah Orde Baru berdampak pada munculnya konglomerasi di seluruh sektor usaha di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya memperkirakan bahwa konglomerasi ini akan menjadi penggerak ekonomi nasional, namun pada kenyataannya pada konglomerat lebih mementingkan bisnisnya daripada Negara

II. Terjadinya Krisis Multidimensional

1. Krisis Politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian,

yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:

- a. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
- b. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
- c. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
- d. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
- e. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

2. Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: 1) Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.



Krisis ekonomi tersebut ditandai dengan:

- a. kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah,
- b. pemerintah melikuidasi enam belas bank bermasalah pada akhir 1997,
- c. pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi empat puluh bank bermasalah lainnya,
- d. perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo,
- e. angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya sama sekali, dan persediaan

sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya harga-harga barang naik tidak terkendali dan hal itu berarti biaya hidup juga makin tinggi.

3. Krisis Hukum

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).

Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM tersebut seperti pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, penumpasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, terjadinya kasus Marsinah, dan penculikan aktivis mahasiswa reformasi. Kasus pelanggaran HAM antara lain berupa pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa. Pelanggaran tersebut merupakan dampak pendekatan keamanan yang dilakukan ABRI dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan.



Munir Said Thalib, korban pelanggaran HAM era Orde Baru

4. Krisis Sosial

Krisis politik, hukum dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah, khususnya kerusuhan-kerusuhan anti-Cina di sejumlah kota di Indonesia. Kelompok Cina/Tionghoa merupakan sasaran kemarahan masyarakat. Hal itu karena kelompok Cina/Tionghoa mendominasi perekonomian di Indonesia. Badai krisis ekonomi makin menjalar dalam bentuk gejala-gejala non-ekonomi. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.



5. Krisis Kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Krisis ini akhirnya berujung pada diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan yang juga merupakan tanda berakhirnya Orde Baru

C. Rangkuman

Pada saat berkuasa Presiden Soeharto berusaha memperkuat kedudukannya , dengan berbagai kebijaksanaan antara lain Dwi Fungsi ABRI, Konsep Massa mengambang, Kooporisasi Negara, Sentralisasi Pemerintahan, Program Bantuan Luar Negeri, sistem semi perwakilan, Namun kebijakan ini berdampak dalam bidang politik yaitu kehidupan negara yang tidak demokratis, dan terjadinya ketimpangan ekonomi. Kemudian pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda dunia bukan hanya Indonesia, krisis inilah yang pada akhirnya membuka mata rakyat yang diwakili oleh mahasiswa maka terjadilah krisis multidimensional dimulai dari krisis politik, ekonomi, hukum sosial yang pada akhirnya bermuara pada krisis kepercayaan

D. Penugasan Mandiri

1. Carilah Artikel mengenai Kasus Kedung Ombo atau Way Jepara , kemudian buatlah kesimpulan dari artikel artikel yang kamu baca, dan apa hubungannya dengan Dwi Fungsi ABRI
2. Krisis Moneter pada tahun 1997 bukan hanya melanda Bangsa Indonesia, tetapi juga diberbagai negara Asia Tenggara Lainnya, Namun di berbagai negara lain tidak menimbulkan krisis multidimensional tetapi di Indonesia menimbulkan krisis Multidimensional dan bahkan menjatuhkan pemerintahan Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun, carilah faktor penyebabnya dan buatlah dalam bentuk tulisan karya ilmiah

E. Latihan Soal

1. Penyimpangan yang pernah dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dari segi ketata negaraan adalah
 - A. Adanya monopoli tafsir atas konstitusi dan dasar negara oleh penguasa
 - B. Tidak efektifnya pelaksanaan pengadilan atas kasus – kasus pidana
 - C. Para pengusaha kakap selalu lolos dari jeratan hukum
 - D. Rendahnya kesadaran politik warga negaranya
 - E. Tidak adanya kebebasan pers
2. Berikut ini yang bukan ciri-ciri pemerintahan Orde Baru adalah
 - A. Dwi Fungsi ABRI
 - B. Pembentukan sistem semi perwakilan
 - C. Pemberlakuan sistem masa mengambang
 - D. Kebebasan berkumpul dan berpendapat
 - E. Pembangunan ekonomi yang mengandalkan bantuan luar negeri dan modal asing
3. Munculnya tuntutan demokrasi, pengakuan HAM dan pembangunan yang berkelanjutan berkaitan dengan pengaruh ...
 - A. Sentralisasi
 - B. Globalisasi
 - C. Urbanisasi
 - D. Rurialisasi
 - E. Monetisasi
4. Tuntutan penghapusan terhadap konsep Dwi Fungsi ABRI muncul pada akhir kekuasaan Orde Baru karena ABRI
 - A. Bersifat Otoriter
 - B. Menjadi alat penguasa
 - C. Menjadi kekuatan Hankam
 - D. Merupakan kekuatan terbesar di DPR
 - E. Tidak mendukung gerakan Reformasi
5. Akibat yang dirasakan oleh rakyat hingga saat ini terhadap politik utang orde baru adalah ...
 - A. Kemandirian rakyat meningkat
 - B. Kesejahteraan rakyat meningkat
 - C. Rakyat ikut menanggung hutang
 - D. Rendahnya tingkat pengangguran
 - E. Tingginya angka pendapatan nasional

Kunci jawaban dan pembahasan

No	Jawaban	Pembahasan
1	A	<p>Bentuk penyimpangan pada masa orde baru diantaranya, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya monopoli tafsir atas konstitusi dan dasar negara oleh penguasa 2. Maraknya terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di pemerintahan. 3. Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara merata sehingga terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah. 4. Terjadinya beberapa pemberontakan diakibatkan ketidakpuasan dari tiap-tiap daerah atas kesenjangan pembangunan. 5. Terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dari berbagai etnis pendatang di Indonesia. 6. Tidak adanya kebebasan berpendapat.
2	D	<p>Adapun ciri pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah cenderung otoriter militeristik. 2. Sistem pemerintahan memiliki corak sentralistik. 3. Terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga Negara yang satu dan lainnya. 4. Kekuasaan serta wewenang Presiden berlebihan. 5. Kepastian hukum, keadilan serta supremasi hukum sangat kurang. 6. Hak untuk berpendapat dikekang. 7. Ditetapkannya Undang Undang Referendum.
3	A	Pemerintahan masa Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan memiliki corak sentralistik, memberikan pengaruh terhadap demokrasi dan pengakuan HAM
4	B	konsep Dwi Fungsi ABRI dilaksanakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan pemerintahan Orde Baru
5	C	Indonesia meminjam dari negara lain dalam jumlah banyak dan dampaknya harga-harga di pasar turun sehingga masyarakat mampu membeli kebutuhan namun karena utang yang membengkak tidak diimbangi dengan pemasukan negara (melalui pajak dll) yang mencukupi akhirnya terjadi krisis ekonomi, pada akhirnya menjadi beban negara

F. Penilaian Diri

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Dapatkah kalian menjelaskan dampak diberlakukannya Dwifungsi ABRI terhadap kehidupan sosial dimasyarakat di Indonesia		
2	Dapatkah kalian menjelaskan pengaruh sentralisasi kebijakan dengan adanya ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah		
3	Dapatkah kalian menjelaskan mengapa pada masa Orde Baru tidak terlihat penggunaan hak dewan seperti hak interplasi dan hak angket dalam sidang DPR		
4	Dapatkah Kalian menjelaskan apa pengertian dari Krisis Multi Dimensional		
5	Dapatkah kalian Menganalisis pengaruh krisis moneter terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998		
6	Dapatkah kalian menceritakan kembali pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru pada peristiwa Way Jepara di Lampung		

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Ciri, Agenda dan proses terjadinya Reformasi dan Kronologi terjadinya suksesi politik

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan, kalian mampu memahami tentang Ciri, Agenda dan proses terjadinya Reformasi dan bagaimana suksesi politik dari Orde Baru ke Reformasi

B. Uraian Materi

I. Ciri, Agenda dan Proses terjadinya Reformasi

1. Ciri-Ciri Gerakan Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama ke tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Gerakan reformasi juga memiliki beberapa ciri, antara lain sebagai berikut:

- a. Gerakan reformasi dilakukan karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadi penyimpangan asas kekeluargaan menjadi nepotisme, praktik kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945. Tujuan reformasi bidang politik adalah demokratisasi, kebebasan berserikat, berkumpul, dan kebebasan berpolitik rakyat yang lebih besar.
- b. Gerakan reformasi dilakukan berdasarkan suatu cita-cita Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Reformasi pada prinsipnya adalah suatu Gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan ideologis yang jelas maka Gerakan reformasi akan mengarah kepada anarkisme dan disintegrasi bangsa dan negara Indonesia seperti yang telah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia.
- c. Gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada kerangka UUD 1945 sebagai kerangka dasar Gerakan reformasi. Reformasi akan mengembalikan sistem kenegaraan pada dasar serta sistem negara demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat seperti terkandung dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Reformasi bertujuan untuk mengembalikan dan melakukan perubahan kearah sistem negara hukum sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari tekanan penguasa, dan legalitas hukum. Tujuan reformasi bidang ekonomi adalah penyehatan sector ekonomi dan kesejahteraan rakyat berupa perbaikan dalam masalah perbankan, perdagangan, dan koperasi yang bebas KKN. Selain itu, sistem monopoli atau oligopoly dihapuskan dan dilakukan penyelesaian masalah hutang luar negeri secara konstruktif.
- d. Reformasi diarahkan menuju suatu perubahan kehidupan kenegaraan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspek, seperti bidang politik, ekonomi, social, budaya serta kehidupan keagamaan. Dengan kata lain, Gerakan reformasi bertujuan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia seutuhnya. Dalam bidang hukum, fokus Gerakan reformasi adalah penegakan hukum dan keadilan. Sesuai dengan peranan

hukum yang diharapkan ikut mengubah perilaku masyarakat maka dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Misalnya, diciptakan UU kepailitan, dihapuskan UU subversi, dan dibebaskannya napol serta tapol dalam rangka menjunjung hak asasi manusia.

- e. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu Gerakan yang berujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan perikehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan social. Dengan demikian, Gerakan reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan menuju terwujudnya Indonesia baru.

2. Agenda Reformasi

Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan VII dan terpilihnya Kembali Presiden Suharto untuk masa jabatan ke 6 (1998-2003), pada awal bulan Maret 1998, situasi politik nasional semakin memanas. Para mahasiswa dan aktivitas LSM melakukan demonstrasi menentang kepemimpinan Suharto selama SU MPR 1998 dan menuntut pergantian kepemimpinan nasional. Terjadinya krisis multidimensi di Indonesia mengundkan keprihatinan mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya.

Pada bulan Mei 1998, mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak untuk menggelar unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang menuntut turunnya harga Sembilan bahan pokok (sembako), dihapuskannya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan lengsernya Suharto dari kursi kepresidenan. Menurut Muhammad Najib, isu-isu yang digulirkan dalam demonstrasi mahasiswa 1998 berisi agenda reformasi, seperti suksesi kepemimpinan nasional, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, dan pemberantasan KKN.

a. Suksesi Kepemimpinan Nasional

Terpilihnya Kembali Presiden Suharto untuk ketujuh kalinya menimbulkan gelombang protes di seluruh Indonesia. Berbagai unsur masyarakat sipil, seperti aktivis LSM, mahasiswa, akademisi dan jurnalis independent mulai menyuarakan tuntutan suksesi kepemimpinan nasional. Tuntutan masyarakat tersebut mewakili aspirasi masyarakat yang mengalami krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Suharto yang dianggap menjadi penyebab terjadinya krisis multidimensi di Indonesia. Selanjutnya, tuntutan politik rakyat tersebut berkembang menjadi aksi-aksi protes dan demonstrasi damai di berbagai kampus untuk menuntut agar Presiden Suharto mengundurkan diri. Protes antipemerintah tersebut semakin marak setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Selanjutnya, aksi protes tersebut mulai meluas dengan ikut sertanya rakyat yang merasa mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu mengatasi krisis moneter yang membebani kehidupan rakyat. Pada awalnya demonstrasi yang digulirkan masyarakat mengajukan tuntutan agar pemerintah mengatasi krisis ekonomi. Namun, karena masyarakat menganggap bahwa aspirasi politiknya diabaikan oleh pemerintahan Orde Baru, tuntutan reformasi ekonomi tersebut berkembang menjadi reformasi total dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR untuk menuntut pengunduran diri Suharto.

b. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Salah satu agenda reformasi yang digulirkan Gerakan mahasiswa adalah penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Dominasi politik ABRI tersebut menjadi salah satu ciri pemerintahan Orde Baru. Dengan memakai konsep Dwi Fungsi, kekuatan social politik ABRI merambah berbagai sekotr kehidupan masyarakat. Misalnya, dibidang birokrasi, dominasi militer terlihat dari pengisian jabatan-jabatan di pemerintahan yang diisi oleh perwira militer. Oleh karena itu, mahasiswa menuntut agar militer tidak berpolitik praktis dan dikembalikan posisinya sebagai kekuatan pertahanan negara yang profesional.

c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Salah satu tuntutan agenda reformasi yang digulirkan oleh berbagai elemen mahasiswa adalah pemberantasan KKN. Salah satu budaya yang merebak di segala sector kehidupan pada masa Orde Baru adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berbagai perilaku kejahatan pejabat ORBA yang merugikan masyarakat dan menguntungkan para pejabat dan kroni-kroni Orde Baru tersebut merupakan salah satu penyebab krisis multidimensi di Indonesia. Hal itu disebabkan karena perilaku KKN tersebut memunculkan sistem ekonomi biaya tinggi yang membebani keuangan negara. Selain itu, budaya KKN yang dilakukan para pejabat Orde Baru tersebut telah menguras sumber ekonomi negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, Pendidikan, dan pembangunan prasarana fisik lainnya. Di lain pihak perilaku nepotisme cenderung merugikan masyarakat karena lebih menguntungkan anggota keluarga atau kroni pejabat untuk memperoleh kemudahan serta kesempatan-kesempatan dalam dunia usaha.



3. Proses terjadinya Reformasi



Mungkin ada yang tahu ini gambar mengenai apa, yah ini adalah gambar pendudukan gedung DPR dan MPR yang ada di wilayah Senayan , peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1998, dan inilah yang kita maksud dengan peristiwa Reformasi. Untuk itu marilah kita pelajari bagaimana terjadinya peristiwa ini

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa wilayah Asia Tenggara sejak Juli 1997 mempunyai kaitan erat pada krisis politik yang terjadi di Indonesia. Kondisi Indonesia yang terbilang mengkhawatirkan saat itu, menyebabkan pelarian modal besar-besaran ke luar negeri sehingga terjadi tekanan terhadap rupiah. Hal ini mengakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang tadinya Rp 2.441/US\$ (Juli 1997) menjadi Rp

3.035/US\$ (Agustus 1997), Rp 4.650/US\$ (Desember 1997), Rp 7.450/US\$ (Januari 1998), Rp 10.550/US\$ (Maret 1998), Rp 9.200/US\$ (Mei 1998) –

krisis moneter yang kemudian menjelma menjadi krisis ekonomi ini, kemudian membuka tabir krisis-krisis lainnya terutama krisis moral di tubuh pemerintahan saat itu, yang diduga banyak melahirkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pada saat krisis moneter tersebut terjadi, harga bahan-bahan pokok naik dan keberadaannya langka, pekerjaan sulit didapat, pengangguran bertambah, angka putus sekolah meningkat, akibatnya pengangguran dan kemiskinan meningkat drastis, bahkan terjadi inflasi yang tinggi.

Krisis ekonomi ini menggoyahkan rezim Presiden Soeharto yang memang legitimasi politiknya sudah semakin melemah. Andil faktor politis itu juga menjadi penyebab terjadinya krisis finansial yang lebih besar dibandingkan negara lain. Menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto, para pejabat orde baru banyak melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi yang tujuannya untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan (*buying time*). Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah dua kali pertemuan dengan tim International Monetary Fund (IMF) pada Oktober 1997 dan Januari 1998, membiarkan dolar Amerika bergerak bebas pada Agustus 1997, likuidasi enam belas bank pada November 1997, dan menyusun RAPBN pada Januari 1998. Dua yang paling menonjol adalah perjanjian yang dilakukan antara Soeharto dengan IMF pada Januari 1998 yang menimbulkan pro-kontra, dan upaya untuk membentuk “Kabinet Pembangunan 7” pada Maret 1998. Sesuai dengan tujuannya untuk memperpanjang kekuasaan, maka kedua kebijakan itu malah memperburuk keadaan. Apalagi dengan ditunjuknya menteri-menteri kabinet baru yang banyak mengandung unsur KKN yang mempunyai hubungan dekat dengan Soeharto.

Jatuhnya nilai rupiah, gagalnya mekanisme pembayaran perdagangan luar negeri, penyelesaian kredit atau pinjaman dari perusahaan besar, atau sistem perbankan yang buruk, serta besarnya pinjaman swasta nasional di luar negeri telah membuat fundamental ekonomi Indonesia yang rapuh menjadi lebih terpuruk. Keterlambatan atau kegagalan pemerintah orde baru mengantisipasi krisis ekonomi dan langkah-langkah kebijakan pemerintah yang tidak berarti banyak untuk perbaikan ekonomi membuat kepercayaan masyarakat hilang terhadap kesungguhan pemerintah dalam mengatasi krisis. Hal ini pula yang dianggap menurunkan pamor Pemerintahan Soeharto, selain parahnya krisis moneter dan ekonomi yang berawal sejak Juli 1997, dan ketegangan hubungan antara Soeharto dan IMF.

Saat itu sebagian besar rakyat semakin sulit menghadapi tekanan ekonomi dan semakin menyadari terjadinya ketimpangan ekonomi yang dianggap hanya menguntungkan sebagian pihak. Pemerataan dan keadilan dinilai belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat karena sistem ekonomi yang berlaku cenderung bersifat monopolistik dan hanya menguntungkan kelompok tertentu terutama para konglomerat dan pihak-pihak yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Puncak ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah terjadi dengan pecahnya kerusuhan 13-15 Mei 1998, yang menurut sebagian besar sumber sebenarnya tidak murni karena dorongan ekonomi tetapi terkait dengan banyak faktor dan kepentingan kelompok-kelompok lain. Momentum kejadian itu juga merupakan luapan dan eskalasi dari beragam peristiwa sebelumnya. Peristiwa apa sajakah itu?

a. Peristiwa Trisakti (Mei 1998)

Setelah sebelumnya mahasiswa melalui HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi, pada 4 Mei 1998, empat organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui Sidang Umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi di Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Sampai akhirnya, pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memakan enam korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Di antaranya adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hertanto,

Hendirawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama Tragedi Trisakti.



Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut, dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13-14 Mei 1998. Di Jawa Tengah, mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turut dalam aksi keprihatinan. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya, termasuk Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan penjarahan di berbagai belahan Jakarta.

Puncaknya, pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR/MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, ketua MPR/DPR RI, Harmoko, menyarankan presiden untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya Sidang Istimewa. Meski begitu, Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya.

Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya.

b. Peristiwa Semanggi I dan II (November 1998)

Meski kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah berganti, bukan berarti permasalahan selesai. Pada November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta Pemilu.

Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B. J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR/MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pimpinan universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat.



Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 11-13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi

Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka.

Sama seperti Tragedi Trisakti, tragedi ini mampu menurunkan tahta kepresidenan Baharuddin Jusuf Habibie yang cuma bertahan 1 tahun. Ketika itu, pada awal September 1999, sasaran unjuk rasa yang mereka tuju adalah rumah dinas BJ Habibie, yang dituding mendapatkan harta kekayaannya dari korupsi. Namun, pada 24 September 1999, Baharuddin Jusuf Habibie akhirnya dilengserkan dari jabatannya. Akhirnya, pada bulan Oktober 1999, MPR menunjuk Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Presiden RI 1999-2004,

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa perjuangan pemuda tak bisa dibendung. Pemuda merupakan sosok yang berani dan cerdas, termasuk peran pemuda di masa perubahan Orde Baru ke Reformasi.

II. Kronologis Jalannya Reformasi

Kronologis Jalannya Reformasi

Bulan Mei 1998 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia, juga momen penting bagi Soeharto. Saat itu, dia menyatakan diri mundur dari kursi kepresidenan. Berikut kronologis lengsernya Soeharto pada Mei 1998.

5 Maret 1998 Dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI 11 Maret 1998 Soeharto dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden

14 Maret 1998 Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII.

15 April 1998 Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjukrasa menuntut dilakukannya reformasi politik.

18 April 1998 Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.

1 Mei 1998 Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.

2 Mei 1998 Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (tahun 1998-red).

4 Mei 1998 Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak (2 Mei 1998) dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Di Universitas Pasundan Bandung, misalnya, 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut.

5 Mei 1998 Demonstrasi mahasiswa besar - besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan. 9 Mei 1998 Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G -15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.

12 Mei 1998 Aparat keamanan menembak empat mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di halaman kampus.

13 Mei 1998 Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu diwarnai kerusuhan.

14 Mei 1998 Soeharto seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo. Sementara itu kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabotabek seperti Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana dan Borobudur. Beberapa dari bangunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggaldunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.

15 Mei 1998 Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam. Toko - toko banyak di tutup. Sebagian warga pun masih takut keluar rumah.

16 Mei 1998 Warga asing berbondong - bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabotabek masih mencekam. 19 Mei 1998 Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurachman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi terakhir, dimana elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Permintaan tersebut ditolak Soeharto. Ia lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi. Pada saat itu Soeharto menegaskan bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden. Namun hal itu tidak mampu meredam aksi massa, mahasiswa yang datang ke Gedung MPR untuk berunjukrasa semakin banyak. Sementara itu Amien Rais mengajak massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

20 Mei 1998 Jalur jalan menuju Lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke kompleks Monumen Nasional namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Pada dinihari Amien Rais meminta massa tak datang ke Lapangan Monumen Nasional karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban jiwa. Sementara ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak berdatangan ke gedung MPR / DPR. Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur.

21 Mei 1998 Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden dan BJ. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga.

C. Rangkuman

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yaitu penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dolar, harga barang barang meningkat tajam dan tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga terjadilah krisis ekonomi, krisis ini membuka tabir tentang praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam pemerintahan akibatnya terjadilah krisis politik yang menyebabkan goyahnya pemerintahan Soeharto yang memang sudah mulai melemah legitimasinya,

dampak dari krisis politik ini adalah munculnya krisis hukum dan krisis sosial, puncaknya adalah terjadinya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, demo besar besaran tidak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, demo ini dipelopori oleh kalangan Mahasiswa, puncaknya adalah terjadinya peristiwa Trisakti dalam peristiwa ini terjadi korban jiwa dari kalangan Mahasiswa, hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan Mahasiswa yang tidak hanya di Jakarta tetapi juga diberbagai daerah di Indonesia, sehingga Mahasiswa melakukan aksi yaitu menduduki gedung DPR dan MPR, sehingga ketua MPR pada saat itu Harmoko menyarankan agar Soeharto mundur dari Jabatan Presiden, dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan mundur dari Jabatan Presiden dan menunjuk wakilnya B.J Habibi sebagai pejabat sementara presiden sampai dilaksanakannya PEMILU

D. Penugasan Mandiri

1. Pada masa Reformasi muncullah 4 (empat) orang tokoh yang dianggap panutan para mahasiswa, tokoh tersebut adalah : Sri Sultan Hamengkubuwono X, Megawati, Abdurahman Wahid dan Amin Rais, buat biografi singkat tentang salah satu tokoh tersebut

2. Salah satu peristiwa yang menyedihkan dari kejadian reformasi adalah peristiwa kekerasan terhadap warga negara keturunan, carilah artikel – artikel dan foto-fotonya dari peristiwa tersebut

E. Latihan Soal

1. Reformasi dimaknai sebagai
 - A. Perubahan secara cepat dalam waktu yang singkat
 - B. Perubahan secara lambat dan terorganisir
 - C. Perubahan dalam setiap bidang kehidupan secara terencana
 - D. Perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan
 - E. Perubahan sera cepat dalam pola yang sama dan serentak
2. Sumber permasalahan yang mendorong lahirnya Reformasi adalah absolutnya Presiden Soeharto. Langkah awal gerakan Reformasi adalah menuntut ...
 - A. Perbaikan sistem Moneter
 - B. Pergantian pemimpin pemerintahan
 - C. Penggantian Undang-Undang
 - D. Pembentukan banyak partai
 - E. Pelaksanaan pemilihan umum
3. Sebab Umum terjadinya gerakan Reformasi adalah.....
 - A. Dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
 - B. Ketidakadilan dibidang hukum dan pemerintahan
 - C. Presiden Soeharto berkuasa terlalu lama
 - D. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan
 - E. Munculnya kerusuhan di berbagai daerah
4. Motor Penggerak tuntutan Reformasi di Indonesia pada awalnya adalah..
 - A. Kaum intelektual
 - B. Mahasiswa
 - C. Militer khususnya TNI – AL
 - D. Tokoh – tokoh politik
 - E. Tokoh – tokoh agama
5. Menjelang bulan April 1998, Demonstrasi Mahasiswa semakin marak terjadi diberbagai daerah. ABRI membiarkan demonstrasi berlangsung dengan syarat....
 - A. Dilakukan didalam kampus
 - B. Tidak mengganggu keamanan
 - C. Tidak merusak fasilitas umum
 - D. Dilaksanakan secara damai
 - E. Tidak mengganggu kegiatan Masyarakat

Kunci Jawaban

No	Jawaban	Pembahasan
1	D	pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara.

2	B	Langkah Awal Pelaksanaan Gerakan Reformasi yaitu Saat Presiden Soeharto lengser dari Jabatannya sebagai Presiden setelah berkuasa Puluhan Tahun, diganti oleh wakil presiden BJ. Habibie
3	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketidakadilan dibidang hukum dan pemerintahan 2. terlalu lamanya Presiden Soeharto berkuasa 3. krisis ekonomi yang berkepanjangan 4. munculnya kerusuhan di berbagai daerah
4	B	Motor penggerak tuntutan reformasi di Indonesia pada awalnya adalah mahasiswa
5	A	Demokrasi dapat dilakukan di dalam kampus. Mahasiswa, baik dari kampus negeri maupun swasta, melakukan demonstrasi di Bandung, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Ambon, Pontianak, Yogyakarta dan Jakarta. Di Jakarta, mahasiswa dari 10 universitas berdemo dan terbagi di dua titik: di Universitas 17 Agustus dan Universitas Nasional. Demonstrasi di Yogyakarta sebagian besar berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Seni Indonesia (ISI), juga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga. Di Purwokerto, 2.000 mahasiswa dari lima kampus turun ke Jalan Jenderal Sudirman.

F. Penilaian Diri

No	Pertanyaan	ya	Tidak
1	Dapatkah kalian menjelaskan ciri - ciri dari gerakan Reformasi		
2	Dapatkah kalian menjelaskan agenda dari reformasi		
3	Dapatkah kalian menceritakan kembali proses terjadinya peristiwa Trisakti		
4	Dapatkah kalian menceritakan kembali proses terjadinya peristiwa Semanggi		
5	Dapatkah kalian menganalisis, mengapa terjadi kekerasan terhadap warga negara keturunan sehingga menimbulkan traumatis pada peristiwa 1998		
6	Dapatkah kalian menganalisis apa tujuan dari para mahasiswa dengan menduduki gedung DPR dan MPR dalam aksinya		

EVALUASI

1. Penyimpangan yang paling parah yang pernah dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dari segi ketata negaraan adalah
 - A. Adanya monopoli tafsir atas konstitusi dan dasar negara oleh penguasa
 - B. Tidak efektifnya pelaksanaan pengadilan atas kasus - kasus pidana

- C. Para pengusaha kakap selalu lolos dari jeratan hukum
 - D. Rendahnya kesadaran politik warga negaranya
 - E. Tidak adanya kebebasan pers
2. Berikut ini yang bukan ciri-ciri pemerintahan Orde Baru adalah ...
 - A. Dwi Fungsi ABRIe
 - B. Pembentukan sistem semi perwakilan
 - C. Pemberlakuan sistem masa mengambang
 - D. Kebebasan berkumpul dan berpendapat
 - E. Pembangunan ekonomi yang mengandalkan bantuan luar negeri dan modal asing
 3. Munculnya tuntutan demokrasi , pengakuan HAM dan pembangunan yang berkelanjutan berkaitan dengan pengaruh
 - A. Sentralisasi
 - B. Globalisasi
 - C. Urbanisasi
 - D. Rurialisasi
 - E. Monetisasi
 4. Tuntutan penghapusan terhadap konsep Dwi Fungsi ABRI muncul pada akhir kekuasaan Orde Baru karena ABRI
 - A. Bersifat Otoriter
 - B. Menjadi alat penguasa
 - C. Menjadi kekuatan Hankam
 - D. Merupakan kekuatan terbesar di DPR
 - E. Tidak mendukung gerakan Reformasi
 5. Akibat yang dirasakan oleh rakyat hingga saat ini karena ;politik utang orde baru adalah ...
 - A. Kemandirian rakyat meningkat
 - B. Kesejahteraan rakyat meningkat
 - C. Rakyat ikut menanggung hutang
 - D. Rendahnya tingkat pengangguran
 - E. Tingginya angka pendapatan nasional
 6. Faktor luar yang mempengaruhi perkembangan perekonomian , kearah terjadinya krisis ekonomi Indonesia adalah.
 - A. Melemahnya IHSG di bursa saham di New York
 - B. Terjadinya krisis ekonomi di Thailand tahun 1996
 - C. Terjadinya krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan juli 1996
 - D. Utang luar negeri membengkak menjadi 137 miliar dollar AS
 - E. Menguatnya nilai tukar dollar Amerika terhadap nilai mata uang-mata uang local
 7. Terjadinya krisis moneter bukan hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga mengakibatkan,....
 - A. kehancuran keuangan nasional
 - B. macetnya sendi-sendi perekonomian nasional
 - C. macetnya sendi-sendi kehidupan social-budaya nasioal
 - D. terjadinya krisis kepercayaan
 - E. terjadinya krisis kepemimpinan
 8. Setahun sebelum pemilu bulan mei 1997, situasi politik dalam negeri mulai memanas, hal ini disebabkan karena, ...
 - A. Rezim orde baru yang didukung Golkar berusaha memenangkan pemilu secara mutlak, sementara tekanan-tekanan terhadap pemerintah makin berkembang.
 - B. Pemerintah tidak mampu menciptakan stabilitas ekonomi, politik dan social pada akhir masa pemerintahan Orde baru

- C. Munculnya kerusuhan di Situbondo, yang di tandai dengan pembunuhan dukun santet
 - D. Kerusuhan sambas, yakni konflik antar etnis atau konflik berbau SARA
 - E. tidak adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara
9. Di tengah situasi politik dalam negeri yang mulai memanas menjelang pemilu bulan mei 1997, terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik. Hal ini disebabkan terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 ,yakni peristiwa,....
- A. Kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta
 - B. Kerusuhan di Situbondo, yang di tandai dengan pembunuhan dukun santet
 - C. Kerusuhan di Tasik Malaya
 - D. Kerusuhan sambas, yakni konflik antar etnis atau konflik berbau SARA
 - E. Kerusuhan Ambon, yakni konflik yang berbau SARA
10. Keberadaan partai-partai yang ada dalam legislative seperti PPP, Golkar dan PDI dianggap tidak mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat, karena,....
- A. Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dan pemerintah melarang mendirikan partai politik lain
 - B. penentuan keanggotaan DPR dan MPR, diatur serta bergantung pada penguasa
 - C. DPR bukan mewakili kepentingan rakyat tapi kepentingan penguasa
 - D. Keanggotaan DPR dan MPR dibentuk melalui Kepres
 - E. Pemilu hanya dijadikan sarana untuk melanggengkan kekuasaan secara sepihak
11. Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar, terutama terlihat pada,....
- A. Perlakuan keras terhadap setiap orang yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
 - B. Pembatasan hak – hak rakyat dalam menyalurkan aspirasinya
 - C. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah social yang cenderung menggunakan langkah represiv
 - D. Tindakan ABRI yang cenderung melanggar HAM dalam mengatasi tindak kejahatan
 - E. Kebijakan pemerintah yang penuh rekayasa politik untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu
12. Terjadinya krisis multidimensional yang melanda Indonesia, telah mengakibatkan,....
- A. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto
 - B. Munculnya rasa nasionalisme yang tinggi untuk bersama-sama mengatasi krisis
 - C. Lunturnya rasa cinta tanah air,bangsa dan negara dari sebagian besar masyarakat
 - D. Terjadinya berbagai tindak anarkhis diberbagai pelosok tanah air
 - E. Masyarakat mudah tersulut emosi dalam mengatasi permasalahan yang sepele
13. Krisis ekonomi Indonesia berawal, dari,
- A. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat
 - B. Utang luar negeri membengkak dan sudah jatuh tempo pembayaran
 - C. Macetnya ekspor-impor sebagai dampak krisis ekonomi negara-negara Asia Tenggara
 - D. Krisis kepercayaan
 - E. Terjadinya krisis perbankan

14. Naiknya Suharto sebagai satu-satunya calon presiden RI dalam sidang umum MPR 1998, tidak dapat dipisahkan dari komposisi anggota DPR/MPR yang lebih mengarah pada,....
 - A. Unsur-unsur Nepotisme
 - B. Unsur-unsur Kolusi
 - C. Unsur-unsur Korupsi
 - D. Unsur-unsur Representatives
 - E. Parlemen dengan stelsel daftar
15. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori kalangan mahasiswa, masalah hukum menjadi salah satu agenda untuk direformasi. Yang diinginkan adalah,
 - A. Hukum dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR
 - B. Mendudukan hukum pada posisi yang sebenarnya
 - C. Setiap warga Negara berkedudukan yang sama dalam hukum
 - D. Adanya supremasi MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat
 - E. sebagai Negara hukum Mahkamah agung memiliki kedudukan paling tinggi dalam hukum
16. Terjadinya krisis multidimensional yang melanda Indonesia, telah mengakibatkan,....
 - A. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto
 - B. Munculnya rasa nasionalisme yang tinggi untuk bersama-sama mengatasi krisis
 - C. Lunturnya rasa cinta tanah air, bangsa dan negara dari sebagian besar masyarakat
 - D. Terjadinya berbagai tindak anarkhis diberbagai pelosok tanah air
 - E. Masyarakat mudah tersulut emosi dalam mengatasi permasalahan yang sepele
17. Reformasi dimaknai sebagai
 - A. Perubahan secara cepat dalam waktu yang singkat
 - B. Perubahan secara lambat dan terorganisir
 - C. Perubahan dalam setiap bidang kehidupan secara terencana
 - D. Perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan
 - E. Perubahan sera cepat dalam pola yang sama dan serentak
18. Sumber permasalahan yang mendorong lahirnya gerakan Reformasi adalah absolutnya Presiden Soeharto. Langkah awal gerakan Reformasi adalah menuntut
 - A. Perbaikan sistem Moneter
 - B. Pergantian pemimpin pemerintahan
 - C. Penggantian Undang-Undang
 - D. Pembentukan banyak partai
 - E. Pelaksanaan pemilihan umum
19. Sebab Umum terjadinya gerakan Reformasi adalah.....
 - A. Dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
 - B. Ketidakadilan dibidang hukum dan pemerintahan
 - C. Presiden Soeharto berkuasa terlalu lama
 - D. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan
 - E. Munculnya kerusuhan di berbagai daerah
20. Motor Penggerak tuntutan Reformasi di Indonesia pada awalnya adalah..
 - A. Kaum intelektual
 - B. Mahasiswa
 - C. Militer khususnya TNI – AL
 - D. Tokoh – tokoh politik
 - E. Tokoh – tokoh agama
21. Menjelang bulan April 1998, Demonstrasi Mahasiswa semakin marak terjadi diberbagai daerah. ABRI membiarkan demonstrasi berlangsung dengan syarat....

- A. Dilakukan didalam kampus
 - B. Tidak mengganggu keamanan
 - C. Tidak merusak fasilitas umum
 - D. Dilaksanakan secara damai
 - E. Tidak mengganggu kegiatan Masyarakat
22. Kerusuhan tanggal 12-13 Mei 1998 terjadi dikota
- A. Solo dan Makasar
 - B. Yogya dan Solo
 - C. Solo dan Jakarta
 - D. Bandung dan Manado
 - E. Semarang dan Surabaya
23. Tuntutan Mahasiswa menuntut reformasi mencapai puncaknya pada tanggal 12 mei 1998. Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi bentrok dengan aparat, yang mengakibatkan beberapa mahasiswa terluka parah dan 4 (empat) orang tewas terkena peluru tajam, antara lain Kecuali ...
- A. Elang Mulya Lesmana
 - B. Hery Hartanto
 - C. Arief Rahman Hakim
 - D. Hendriawan Sie
 - E. Hafidin Royan
24. Pada tanggal 18 Mei 1998 tokoh yang selama ini dekat dengan Presiden Soeharto dan menjabat sebagai ketua MPR secara terang terangan meminta Soeharto mengundurkan diri demi kepentingan nasional. Tokoh yang dimaksud adalah.....
- A. Amin Rais
 - B. Emil Salim
 - C. B.J. Habibi
 - D. Harmoko
 - E. Adnan Buyung
25. Rapat Akbar di Monas pada tanggal 20 Mei 1998 dibatalkan karena
- A. Masyarakat tidak memenuhi undangan Amin Rais
 - B. Para mahasiswa tidaksetuju dengan undangan Amin Rais
 - C. Amin Rais tidak berhasil melobi para wakil rakyat untuk datang
 - D. Situasinya tidak memungkinkan diselenggarakannya rapat
 - E. Ketua DPR dan MPR Harmoko menjamin Presiden akan mundur
26. Salah satu alasan pengunduran diri Presiden Soeharto yang dikemukakan pada tanggal 21 Mei 1998 adalah tentang
- A. Ketidak berhasilannya menurunkan harga
 - B. Tidak terwujudnya rencana pembentukan komite Reformasi
 - C. Masa pemerintahannya yang terlalu lama
 - D. Desakan dari Mahasiswa dan tokoh tokoh masyarakat
 - E. Didudukinya gedung DPR/MPR oleh para demonstiran
27. Demonstrasi para mahasiswa dan masyarakat yang dilakukan dengan aksi damai menuntut adanya reformasi politik, ekonomi dan hukum, menjadi semakin gencar karena kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 4 mei 1998, yakni,....
- A. Pembentukan komite reformasi dan perubahan kabinet oleh Presiden Suharto
 - B. Pengumuman kenaikan harga BBM dan ongkos angkot
 - C. Pembentukan BPPN dan keputusan dikeluarkannya KLBI
 - D. Pembubaran IGGI
 - E. Rencana pencabutan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1996
28. Puncak aksi mahasiswa menuntut reformasi itu terjadi pada tanggal 12 mei 1998, yang ditandai dengan terjadinya,....
- A. Tragedi Semanggi
 - B. Tragedi Trisakti
 - C. Peristiwa Malari

- D. Tragedi Tanjung Priok
 - E. Peristiwa Kuda Tuli
29. Ketika melalui sidang umum MPR awal maret 1998 Suharto terpilih kembali menjadi presiden RI, kondisi bangsa dan Negara saat itu tidak semakin baik. Indikatornya adalah
- A. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah social makin menumpuk
 - B. Kebijakan politik tidak menentu , stabilitas keamanan merosot
 - C. Ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, DPR maupun MPR
 - D. Utang luar negeri membengkak menjadi 137 miliar dollar AS
 - E. Banyak investor yang memindahkan investasinya ke luar negeri
30. Sebagai bentuk rasa ketidak puasan terhadap pemerintah, memasuki bulan mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi-aksi keprihatinan. Yang dituntut adalah Kecuali
- A. Turunnya harga sembako
 - B. Penghapusan KKN
 - C. Turunnya Suharto dari kursi kepresidenan
 - D. Mengganti pemimpin pemerintahan
 - E. Agar IMF menghapus utang luar negeri Indonesia
31. Semakin banyaknya aksi demonstrasi mahasiswa menyebabkan aparat kemanan kewalahan,sehingga mereka harus bertindak tegas, akibatnya
- A. Untuk mencegah timbulnya korban, dan menciptakan suasana aman aktivitas kerja cabinet/pemerintahan sementara dihentikan
 - B. Bentrok antar mahasiswa yang menuntut reformasi dengan aparat keamanan tidak dapat dihindarkan.
 - C. Pemerintah dengan alasan demi kepentingan rakyat memenuhi tuntutan mahasiswa
 - D. Demonstrasi meluas kemana-mana, sehingga roda perekonomian macet
 - E. Meluasnya terjadi tindakan anarkhis para mahasiswa yang diikuti berbagai lapisan masyarakat lain
32. Meninggalnya 4 (empat) orang mahasiswa Trisakti, mendorong semangat mahasiswa untuk menggelar demonstrasi besar-besaran.Hal ini berbuntut munculnya peristiwa tanggal 13-14 Mei 1998 yang menekan banyak korban jiwa dan harta benda, yaitu peristiwa
- A. Penjarahan masal dengan sasaran pertokoan milik warga Cina keturunan
 - B. Pendudukan gedung DPR/MPR oleh para mahasiswa
 - C. Bentrok massal antara kelompok pendukung pemerintah dan kelompok pendukung gerakan reformasi
 - D. konflik horizontal akibat munculnya Isu dukun Santet di banyuwangi
 - E. Konflik berbau SARA di Sambas dan Ambon
33. Menanggapi berbagai isu reformasi yang terus berkembang, tanggal 20 mei 1998, Suharto mengundang tokoh-tokoh nasional, yakni untuk
- A. Dimintai pertimbangan dalam membentuk Dewan Reformasi Nasional yang diketuai Presiden Suharto.
 - B. Dimintai pertimbangan dalam membentuk cabinet Reformasi
 - C. Dimintai pertimbangan dalam rangka mengambil langkah-langkah reformasi.
 - D. Mendukung kebijakan Presiden dalam menyikapi berbagai aksi mahasiswa yang semakin anarkhis.
 - E. Mendukung amandemen UUD 45
34. Tujuan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa pada tahun 1998 adalah...
- A. Memperbarui tatanan bernegara sesuai Pancasila dan UUD 1945
 - B. Mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap rezim Orde Baru
 - C. Mengembalikan kekayaan negara yang telah diambil pejabat Orde Baru
 - D. Memberdayakan lembaga tinggi negara lebih peduli kepada rakyat
 - E. Menuntaskan permasalahan hukum yang pernah diselewengkan

35. Pengertian krisis kepercayaan adalah...
- Ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah
 - Banyaknya kerusuhan yang dialami negara
 - Ketidakpuasan rakyat pada hasil pemilu
 - Timbulnya gerakan Reformasi
 - Terjadinya krisis politik
36. Perhatikan keterangan berikut ini
- Hancurnya bursa saham Jakarta
 - Berdirinya perusahaan modern asing di Indonesia
 - Terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan
 - Beberapa bank nasional harus dinasionalisasi
 - Harga barang-barang kebutuhan pokok sangat merosot
 - Daya beli masyarakat mengalami penurunan
- Pada bulan Oktober 1997 nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp.5.000,00/US\$. Dampak dari kondisi ini ditunjukkan oleh nomor...
- 1, 2, dan 4
 - 1,3, dan 6
 - 2,4, dan 5
 - 3,4, dan 6
 - 4,5, dan 6
37. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi bersumber dari beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang kurang tepat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan berupa...
- Kurangnya pembangunan sektor-sektor ekonomi di berbagai daerah
 - Kurang berkembangnya jiwa kewirausahaan masyarakat karena terbatasnya peluang dan adanya persaingan yang berat
 - Munculnya pelaku pasar dengan modal besar di sektor-sektor industri
 - Semakin banyaknya pasar tradisional yang menjalankan kegiatan ekonominya
 - Adanya pembatasan terhadap utang luar negeri sehingga pemerintah Orde Baru tidak cukup memiliki dana untuk memajukan perekonomian
38. Salah satu faktor penyebab munculnya krisis hukum adalah belum adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerintah. Bahkan, dalam praktiknya kekuasaan kehakiman...
- Menjadi sarana untuk memperoleh keadilan bagi para penguasa
 - Digunakan sebagai rujukan bagi masyarakat yang ingin memperoleh keadilan
 - Menjadi lembaga yang bebas dari campur tangan partai politik
 - Menjadi pelayan kepentingan penguasa dan kroni-kroninya
 - Digunakan sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan sosial
39. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- Mengeluarkan instruksi untuk membredel sejumlah media masa yang memberitahukan kesalahan pemerintah Orde baru
 - Menaikan bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik
 - Pada tanggal 9 Mei 1998 Presiden Soeharto justru menghadiri Konferensi G-15 di Kairo, Mesir
 - Menekan aksi demonstrasi di berbagai daerah dengan cara menggunakan kekuatan ABRI
 - Menangkap tokoh-tokoh mahasiswa yang memelopori aksi demonstrasi
- Ditengah maraknya demonstrasi pada bulan April 1998, pemerintah Orde Baru justru mengambil langkah yang kurang tepat. Langkah tersebut ditunjukkan pada pernyataan nomor...
- 1 dan 2
 - 2 dan 3
 - 2 dan 4
 - 3 dan 5

- E. 4 dan 5
40. Sejalan dengan Jakarta yang semakin kacau, pada bulan Mei 1998 muncul tuntutan untuk diadakan sidang istimewa dengan agenda...
- A. Pelaksanaan pemilu
 - B. Pembubaran DPR/MPR
 - C. Pengadilan terhadap pejabat-pejabat Orde Baru
 - D. Pemberantasan korupsi hingga seakar-akarnya
 - E. Pemilihan presiden dan wakil presiden baru
41. Usaha Presiden Suharto untuk membentuk kabinet baru menggantikan Kabinet Pembangunan VII mengalami kegagalan karena...
- A. Adanya pernyataan dari para menteri bahwa mereka tidak bersedia menjabat dalam kabinet baru serta mendesak presiden untuk turun
 - B. Waktu yang diperlukan untuk membentuk kabinet baru terlalu lama sehingga rakyat tidak menanggapi
 - C. Terlalu banyak anggota kabinet baru yang berasal dari pejabat-pejabat Orde Baru yang tidak reformis
 - D. Tidak adanya dukungan dari Golkar atas pembentukan kabinet baru
 - E. Munculnya pertentangan antara golongan akademisi dan praktisi terkait dengan pembentukan kabinet baru
42. Mengingat upaya untuk memperoleh dukungan para tokoh nasional mengalami kegagalan, gedung DPR makin penuh sesak mahasiswa, tuntutan pengunduran diri Suharto makin kuat, akhirnya tanggal 21 Mei 1988 Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden, yakni di
- A. Istana Merdeka
 - B. Istana Presiden
 - C. Istana Bogor
 - D. Istana Cendana
 - E. Istana Tampak Siring
43. Pengunduran diri Suharto sebagai Presiden, kemudian segera diikuti dengan penunjukkan Habibie sebagai penggantinya(presiden ke 3). Dasar hukumnya adalah....
- A. Pasal 8 UUD 45
 - B. Pasal 9 UUD 45
 - C. Pasal 11 UUD 45
 - D. Pasal 6 UUD 45
 - E. Pasal 14 UUD 45
44. Perhatikan pernyataan yang berkaitan dengan kronologi jatuhnya orde baru berikut ini
- I. Pemilu ke enam masa orde baru dan Golkar menang mutlak
 - II. sidang istimewa MPR 1998 , memilih kembali Suharto sebagai Presiden dan Habibie sebagai wakil presiden
 - III. Mei 1998 mahasiswa dari berbagai daerah bergerak menggelar demonstrasi
 - IV. Unjuk rasa mahasiswa Trisakti berujung bentrok dengan aparat keamanan
 - V. Mei 1998 terjadi kerusuhan massal dan penjarahan
 - VI. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya menduduki gedung DPR/ MPR
 - VII. Ketua MPR Harmoko meminta agar presiden Suharto secara arif dan bijaksana mengundurkan diri
 - VIII. Presiden Suharto mengundang para tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi
 - IX. Suharto meletakkan jabatan sebagai Presiden
- Urutan yang benar dari pernyataan tersebut di atas adalah,
- A. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
 - B. I, II, IV, III, V, VI, VII, VIII, IX

- C. I, II, III, IV, VI, V, VII, VIII, IX
 - D. I, II, III, IV, VI, V, VII, VIII, IX
 - E. I, II, III, IV, VI, VII, V, VIII, IX
45. Perhatikan informasi berikut

Pada tahun 1966, Presiden Sukarno melalui TAP IX/MPRS/1966 secara tidak langsung menunjuk Jenderal Soeharto sebagai pengganti pengembalian kekuasaan kepresidenan. Hal ini dilakukan setelah terjadi aksi-aksi protes dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa yang dipimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). KAMI kemudian dibubarkan pada 25 Februari 1966. Dengan dibubarkannya KAMI, muncul Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) yang melanjutkan tuntutan mereka kepada presiden terkait peristiwa Gerakan 30 September dan kondisi ekonomi. Pada tahun 1998, tepatnya 17 Mei, mahasiswa kembali melakukan aksi menduduki Gedung DPR/MPR agar tuntutan mereka kepada Presiden Soeharto untuk mundur dipenuhi. Massa mulai melakukan aksi setelah terjadi krisis ekonomi ditambah krisis pemerintahan pasca-Pemilu 1997.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa....

- A. Mahasiswa adalah penggerak roda pemerintahan dalam suatu negara
- B. Mahasiswa mampu menarik simpati rakyat melebihi pemerintahan sendiri
- C. Mahasiswa memiliki kebiasaan untuk melakukan aksi-aksi protes dengan cara yang unik
- D. Mahasiswa menjadi penggerak terjadinya pengulangan suatu peristiwa sejarah dengan situasi zaman yang berbeda
- E. Mahasiswa memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik

JAWABAN EVALUASI

NO	JWB	NO	JWB	NO	JWB	NO	JWB	NO	JWB
1	A	10	A	19	B	28	B	37	B
2	D	11	A	20	B	29	A	38	D
3	A	12	A	21	A	30	E	39	B
4	B	13	A	22	C	31	B	40	E
5	C	14	A	23	C	32	A	41	A
6	C	15	B	24	D	33	A	42	A
7	A	16	A	25	D	34	A	43	A
8	A	17	D	26	B	35	A	44	A
9	A	18	AB	27	B	36	B	45	D

DAFTAR PUSTAKA

Herimanto, Eko Targiyatmi, Pembelajaran sejarah interaktif 3, PT Tiga Serangkai (Solo : Januari 2015)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Indonesia Kelas XII, Kementrian Pendidikan Nasional , Jakarta 2015

Herimanto, Eko targiatmi, Sejarah Indonesia Kelas XII, PT Tiga Serangkai (Solo : Desember 2018)

<https://blog.ruangguru.com/sejarah-kelas-12-peran-pemuda-di-masa-perubahan-orde-baru-dan-reformasi>

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_mahasiswa_Indonesia_1998

<https://nasional.kompas.com/read/2008/01/27/16234932/Kronologi.Kelengseran.Soeharto..Mei.1998?page=all>.

<https://xiiiisdua.wordpress.com/2016/01/22/krisis-multidimensional-pada-masa-orde-baru/>

<https://xiiiisdua.wordpress.com/2016/01/04/penguatan-negara-pada-masa-pemerintah-orde-baru/>